



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAINI RAHMANIA

2. Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN I

3. NHK : 675201

### II. DATA HARTA

### A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
   CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 332 m2 di KAB / KOTA KOTA CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

## B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 24.500.000

- MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7,000,000
- 2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
- 3. MOTOR, YAMAHA 1 KP AT / R2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	67.100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	72.194.618
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	192.742.600
F. HARTA LAINNYA	Rp.	92.088.457
Sub Total	Rp.	2.048.625.675
III. HUTANG	Rp.	23.456.210
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.025.169.465

#### Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

